



# LAPORAN DELEGASI DPR RI OECD GLOBAL PARLIAMENTARY NETWORK 2025

5-7 Februari 2025 Paris - Perancis



**THE HOUSE OF REPRESENTATIVES  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**2025**





**LAPORAN DELEGASI**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**DALAM RANGKA MENGHADIRI**  
**OECD Global Parliamentary Network 2025**  
Paris – Perancis, 5-7 Februari 2025

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

OECD *Global Parliamentary Network* merupakan pusat pembelajaran legislatif bagi legislator dan pejabat parlemen yang dibentuk pada tahun 2011. Strukturnya yang fleksibel memungkinkan anggota parlemen dari seluruh spektrum politik untuk berbagi pengalaman, mengidentifikasi praktik yang baik, dan membina kerja sama legislatif internasional.

Para anggota memperoleh manfaat dari analisis dan rekomendasi OECD mengenai isu-isu yang sedang mereka tangani, dan dapat bertemu dan bertukar pikiran dengan rekan sejawat dan pakar untuk membandingkan praktik terbaik.

Jaringan ini menempatkan Anggota Parlemen di garis depan percakapan kebijakan, dan memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dalam isu-isu yang paling mendesak dalam agenda legislatif mereka.

Pertemuan OECD *Global Parliamentary Network* berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 Februari 2025, di Pusat Konferensi OECD di Paris, Prancis. Dengan hampir 140 anggota parlemen dan 45 pejabat parlemen yang mewakili lebih dari 40 negara, keberagaman perspektif dan kedalaman diskusi sangat luar biasa.



Rapat Pleno 2025 menampilkan berbagai sesi, termasuk pertemuan bilateral dengan meja ekonomi negara-negara OECD, konsultasi tentang Strategi Pembangunan OECD, beberapa fokus pada Iklim dan AI, tetapi juga pada Energi, ekonomi Global, pergeseran Demografi, Survei Keterampilan Orang Dewasa OECD, dan kebijakan Persaingan.

## B. Dasar Pengiriman Delegasi

Partisipasi Delegasi DPR RI pada OECD *Global Parliamentary Network* 2025 ini berdasarkan :

1. Surat kepada Ketua DPR RI perihal Undangan untuk menghadiri OECD *Global Parliamentary Network* 2025 yang diselenggarakan di Paris, Perancis.
2. Hasil keputusan Rapat Pimpinan BKSAP yang menyetujui kehadiran Delegasi DPR RI di Pertemuan tersebut.
3. Surat Tugas Nomor 03/KU.05.01/ST/KSOI/1/2025 tentang Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri OECD *Global Parliamentary Network* 2025 di Paris, Perancis.

## C. Susunan Delegasi

Adapun susunan dan komposisi Delegasi DPR RI pada OECD *Global Parliamentary Network* 2025 di Paris, Perancis antara lain:

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1	Bramantyo Suwondo, M.IR.	F. P-Demokrat / A.557	Wakil Ketua BKSAP / Ketua Delegasi
2	Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si.	F. P-Golkar / A.336	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi
3	dr. Mufti Aimah Nurul Anam	F. PDIP / A. 215	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi

## D. Tujuan

Tujuan dari pengiriman Delegasi DPR RI ke OECD *Global Parliamentary Network 2025* di Paris, Perancis antara lain:

1. Berpartisipasi dan berperan dalam OECD *Global Parliamentary Network 2025* untuk menguatkan diplomasi parlemen Indonesia dan melaksanakan mandat dari UU MD3 untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyampaikan pandangan DPR RI terkait dengan penguatan peran parlemen dan kesiapan Indonesia dalam proses akses ke dalam OECD.
3. Menjalin kerja sama yang lebih erat dan menguatkan jaringan DPR RI dengan parlemen global terkhusus parlemen negara anggota OECD untuk mendukung akses Indonesia untuk masuk ke OECD.

## II. LAPORAN

### A. Agenda Sidang

OECD *Global Parliamentary Network 2025* diselenggarakan selama 2 (dua) hari di Paris, Perancis dengan jadwal agenda sebagai berikut:

<b>DAY 1: 5 Februari 2025</b>	
<b>Waktu</b>	<b>Agenda</b>
11:00 - 11:25	Opening session with OECD Secretary-General Mathias Cormann
11:45 - 13:00	Global economic outlook
14:30 - 15:45	Climate adaptation and resilience
16:00 - 17:15	Climate mitigation and net-zero transition
17:15 - 18:15	Consultation on the OECD Development Strategy
<b>DAY 2: 6 Februari 2025</b>	
09:00 - 10:00	Skills for a changing world – The OECD Survey of Adult Skills
10:15 - 11:15	Governing with AI
11:15 - 12:15	AI in Work, Innovation, Productivity and Skills
14:00 - 15:15	Demographic shifts
15:15 - 16:30	Update on energy markets and trends

16:45 - 18:00	Competition policy
<b>DAY 3: 7 Februari 2025</b>	
09:30 - 11:30	Special session on Accession

## **B. Partisipasi Delegasi DPR RI**

### 1. Hari ke-1

#### a. **Opening Session**

*Global Parliamentary Network 2025* dibuka oleh Sekretaris Jendral OECD, Mathias Cormann. Dalam pidato sambutannya Cormann menyampaikan selamat datang kepada delegasi parlemen dari negara anggota OECD, negara yang sedang dalam proses aksesi OECD dan negara pengamat dalam pertemuan ini.

#### b. **Global Economic Outlook**

Dalam sesi ini dijabarkan oleh Alvaro S. Pereira, Kepala Ekonom OECD. Dijelaskan pada sesi ini adalah proyeksi OECD terkait pertumbuhan PDB global sebesar 3,3% pada tahun 2025, naik dari 3,2% pada tahun 2024 dan 3,3% pada tahun 2026.

Inflasi di OECD diperkirakan akan mereda lebih lanjut, dari 5,4% pada tahun 2024 menjadi 3,8% pada tahun 2025 dan 3,0% pada tahun 2026, didukung oleh kebijakan moneter yang masih ketat di sebagian besar negara.

Ketatnya pasar tenaga kerja juga mereda, meskipun tingkat pengangguran secara umum tetap pada atau mendekati level terendah dalam sejarah. Namun, risiko membayangi proyeksi sentral yang relatif jinak. Risiko utama berkaitan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, inflasi yang ternyata lebih persisten dari yang diantisipasi, dan penetapan ulang risiko yang tajam di pasar keuangan.

Pandangan delegasi DPR RI mengenai isu ini adalah dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang telah menetapkan

target pembangunan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun 2025, yang sejalan dengan tujuannya pada tahun 2024 dan didukung oleh Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (UU APBN 2025). Selanjutnya, untuk mengatasi tantangan dan menavigasi ketidakpastian kondisi global, Indonesia telah menerapkan pendekatan kebijakan campuran melalui bank sentralnya untuk memastikan stabilitas ekonomi.

c. **Climate Adaptation and Resilience**

Sesi ini memaparkan tugas utama OECD tentang adaptasi dan ketahanan iklim, memberikan gambaran umum kepada para pembuat kebijakan tentang bagaimana OECD dapat mendukung pemerintah Anggota dan non-Anggota di semua tingkatan. Narasumber pada sesi ini adalah Wakil Kepala Direktorat Lingkungan OECD, Kumi Kitamori, dan Wakil Sekretaris Jedral OECD, Mary Beth Goodman.

Delegasi DPR RI, Adde Rossi Khoerunnisa menyampaikan bahwa DPR RI memandang penanganan perubahan iklim sebagai prioritas nasional dan internasional yang utama. DPR RI sangat mendukung berbagai komitmen dan tujuan internasional, termasuk yang disepakati dalam *Conference of the Parties (COP)*. Sebagaimana dinyatakan pula dalam dokumen hasil Sidang Parlemitter pada COP 29 di Baku, Azerbaijan, pada bulan November 2024, penting untuk meningkatkan urgensi adaptasi dan memberikan dukungan adaptasi secara memadai.

Beberapa langkah hukum telah ditempuh Indonesia, antara lain Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim. Selain itu, Program Kampung Iklim yang dikelola oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong keterlibatan masyarakat dalam aksi iklim.

DPR RI terus berkomitmen untuk menggalang upaya guna memastikan kerja sama yang efektif, khususnya antara negara maju dan berkembang, dalam memastikan pemenuhan komitmen pendanaan iklim untuk perubahan iklim, termasuk Dana Kerugian dan Kerusakan (*Loss and Damage Fund*).

d. **Climate Mitigation and Net-Zero Transition**

Pada sesi ini dijelaskan mengenai peran OECD dalam upaya mitigasi iklim, menyoroti apa yang dapat dilakukan para pembuat kebijakan untuk mencapai transisi menuju nol emisi bersih melalui tindakan kebijakan yang efektif dan ambisius. OECD bekerja sama dengan pemerintah Anggota dan non-Anggota di semua tingkatan, serta dengan masyarakat sipil dan pelaku sektor swasta untuk memastikan komitmen iklim diterjemahkan menjadi tindakan efektif yang dipercepat, termasuk melalui penyelarasan dan peningkatan pendanaan dan investasi secara cepat dari semua sumber. Sebagai narasumber adalah Wakil Kepala Direktorat Lingkungan OECD, Kumi Kitamori, dan Wakil Sekretaris Jedral OECD, Mary Beth Goodman.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menyampaikan dalam intervensinya bahwa untuk terwujudnya transisi Net-Zero, kerja sama internasional kerja sama tetap dibutuhkan. Ia menekankan bahwa OECD harus menjadi platform untuk memastikan komitmen apa pun, termasuk investasi hingga 300 miliar USD per tahun pada tahun 2035 untuk negara-negara berkembang benar-benar terwujud. OECD harus menjadi platform untuk memastikan kerja sama yang didasarkan pada prinsip “tanggung jawab bersama tetapi berbeda dan kemampuan masing-masing” dan yang mematuhi pilar-pilar pembangunan

berkelanjutan – ekonomi, sosial dan lingkungan, serta tata kelola yang baik.

Bramantyo juga mendorong kerja sama, sumber daya energi terbarukan; pengembangan mineral yang berkelanjutan; transportasi hijau; dan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik. Terkait hal ini, Indonesia menargetkan energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025. Selain itu, RUU Energi Baru dan Terbarukan telah disetujui bersama dalam Rapat Paripurna untuk menjadi RUU Inisiatif DPR.

Untuk mencapai target tersebut, Indonesia perlu membangun listrik hijau hingga 8.224,1 Megawatt (MW) yang membutuhkan investasi sekitar Rp 216 triliun. Secara keseluruhan, Indonesia membutuhkan investasi lebih dari 1 triliun USD untuk (mencapai) emisi nol bersih pada tahun 2060. Dan total potensi energi terbarukan di Indonesia adalah 3.687 Gigawatt, yang terdiri dari energi surya, angin, hidro, bioenergi, panas bumi, dan juga laut. Salah satu potensi energi surya terbesar di Indonesia terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (369,5 GWp), Riau (290,4 GWp), dan Sumatera Selatan (285,2 GWp).

e. **Consultation on the OECD Development Strategy**

OECD bertujuan untuk menggabungkan perspektif dari para legislator saat menyusun Strategi Pembangunan yang baru. Hal ini terkait dengan tujuan keseluruhan OECD untuk mendukung pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif serta membantu menciptakan peluang yang lebih baik bagi semua orang, termasuk dengan bekerja sama dengan pasar-pasar baru dan negara-negara ekonomi berkembang di dalam dan di luar keanggotaan. Beberapa elemen strategi tersebut dapat mencakup:

- Memanfaatkan kekuatan inti OECD, termasuk kapasitas analitisnya, basis bukti multidisiplin, dan rekam jeaknya dalam mendukung solusi multilateral yang efektif dan inklusif.

- Memberikan penawaran yang komprehensif untuk mendukung rencana dan upaya pembangunan negara-negara.
- Memperkuat koherensi kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan, meningkatkan saling pengertian dengan negara-negara mitra tentang potensi dampak standar OECD.

Indonesia ingin menegaskan kembali komitmen nasional kami untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Oleh karena itu, sangat penting bagi OECD New Development Strategy (NDS) untuk mencerminkan SDGs sebagai acuan kebijakan utama. Penting bagi NDS untuk menyediakan akses yang sama bagi negara-negara berkembang dalam hal bantuan teknis dan berbagi pengetahuan di sektor transisi energi, ekonomi hijau, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, dan transformasi digital. Indonesia juga berharap agar NDS mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing negara yang unik dan mempromosikan inklusi sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kualitas hidup secara keseluruhan – karena faktor-faktor tersebut tidak diperhitungkan.

## 2. Hari ke-2

### a. **Skills for a changing world – The OECD Survey of Adult Skills**

Pada sesi ini membahas mengenai bagaimana orang dewasa dapat mengembangkan keterampilan dasar, seperti – membaca dan memahami teks, bekerja dengan angka, dan memecahkan masalah yang rumit –terutama di tengah kemajuan teknologi dan pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) yang dapat menggantikan pekerjaan manusia. Narasumber pada sesi ini adalah Andreas Schleicher, Direktur Pendidikan dan Keterampilan OECD, dan Yoshiki Takeuchi, Wakil Sekretaris Jendral OECD.

Dibahas juga revolusi digital tengah membentuk kembali ekonomi dan masyarakat, sangat penting untuk mengevaluasi kecakapan

orang dewasa dalam literasi, numerasi, dan pemecahan masalah adaptif. Literasi memungkinkan individu untuk memahami dan berinteraksi dengan berbagai informasi, mulai dari konten daring hingga dokumen yang rumit. Numerasi sangat penting untuk mengelola keuangan, menafsirkan data, dan membuat keputusan yang tepat. Pemecahan masalah adaptif memungkinkan orang dewasa untuk menghadapi tantangan secara langsung, berinovasi, dan beradaptasi dengan keadaan baru.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkomitmen untuk mendukung dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong pengembangan berkelanjutan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang kompeten guna mencapai tujuan tersebut selama dekade berikutnya.

Indonesia juga telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk berbagai kebijakan Pembelajaran Sepanjang Masa yang bersifat lintas sektoral. Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 dirancang untuk meningkatkan daya kerja, daya saing, dan produktivitas melalui pendidikan vokasi. Program Pra-Kerja dikembangkan dengan tujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta menumbuhkan keterampilan kerja yang lebih baik bagi para pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau mereka yang memerlukan peningkatan kompetensi.

b. **Governing with AI**

Sesi ini diisi oleh Direktur Pemerintahan Publik OECD, Elsa Pilichowski. Ia menguraikan tren utama dan tantangan kebijakan dalam pengembangan, penggunaan, dan penerapan AI di dan oleh sektor publik. Sesi ini membahas potensi manfaat dan risiko spesifik yang terkait dengan penggunaan AI di sektor publik. Selanjutnya dijelaskan bagaimana AI di sektor publik dapat

digunakan untuk meningkatkan produktivitas, daya tanggap, dan akuntabilitas. Sesi ini juga memberikan gambaran umum tentang isu-isu kebijakan utama dan menyajikan contoh-contoh bagaimana negara-negara mengatasinya di seluruh OECD.

Indonesia menyoroti konsekuensi dari penerapan sistem persenjataan otonom yang menggunakan AI dan dapat secara mandiri mencari, memilih, dan menggunakan kekuatan terhadap target tanpa campur tangan manusia, yang dapat berdampak buruk pada hak asasi manusia untuk hidup. Indonesia juga berpandangan bahwa perlu dan penting untuk mempertimbangkan pembentukan Komite Masa Depan di negara atau parlemen kita masing-masing yang menggabungkan masa depan dalam proses pengambilan keputusan saat ini, sehingga dapat mengidentifikasi lebih lanjut kemungkinan-kemungkinan baru di masa depan seiring dengan perkembangan dunia.

c. **AI in Work, Innovation, Productivity and Skills**

Dalam sesi ini, Angelica Salvi Del Pero – penasihat senior direktur OECD untuk Ketenagakerjaan, Perburuhan dan Urusan Sosial – memaparkan tentang dampak AI di pasar tenaga kerja di seluruh OECD dan membahas langkah-langkah kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi risiko penggunaan AI di pasar tenaga kerja.

Temuan OECD menunjukkan bahwa AI memiliki dampak transformasional pada pasar tenaga kerja kita. Seperti yang ditunjukkan dalam Prospek Ketenagakerjaan OECD 2023, sejauh ini hanya ada sedikit bukti bahwa AI menyebabkan hilangnya pekerjaan. Dalam banyak kasus, AI memiliki dampak positif pada beberapa dimensi kualitas pekerjaan. Namun, potensi otomatisasi tetap tinggi, dengan pekerjaan yang paling berisiko mengalami otomatisasi mencapai 27% dari pekerjaan di seluruh OECD. AI juga

membentuk kembali komposisi tugas dari banyak pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukannya.

Dalam konteks pengembangan AI di tempat kerja, Pemerintah Indonesia telah menetapkan prioritas untuk mengatasi kesenjangan digital, menjamin manfaat nyata AI bagi masyarakat, mengantisipasi dan memitigasi risiko di masa mendatang, serta memastikan tata kelola global yang konsisten dengan kepentingan nasional dan negara berkembang.

Indonesia berpendapat bahwa pengembangan AI di tempat kerja harus mempertimbangkan kesenjangan kapasitas antarnegara di seluruh dunia, termasuk kapasitas sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur, dan keuangan. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret harus diambil untuk mengatasi kesenjangan kapasitas tersebut. Saat ini, DPR RI tengah membahas RUU Keamanan Siber sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Diharapkan pembahasan RUU ini dapat meningkatkan keamanan siber nasional, termasuk perlindungan dari ancaman siber berbasis AI, dan juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap infrastruktur digital nasional.

d. **Demographic shifts**

Sesi ini mengkaji implikasi penuaan populasi terhadap pasar tenaga kerja dan kebijakan yang perlu dipertimbangkan negara-negara untuk membantu mempertahankan standar hidup di negara-negara OECD, termasuk mempromosikan pekerjaan bagi orang lanjut usia dengan kesehatan yang baik dan perempuan serta memanfaatkan keterampilan migran secara maksimal. Narasumber pada sesi ini adalah Stefano Scarpetta, Ketenagakerjaan, Perburuhan dan Urusan Sosial OECD dan Yoshiki Takeuchi, Wakil Sekretaris Jendral OECD.

Dipaparkan bahwa masyarakat di negara-negara OECD hidup lebih lama dan menua dengan kesehatan yang lebih baik daripada di masa lalu. Namun, tingkat kesuburan di negara-negara OECD telah anjlok, dan saat ini hampir setengah dari angka pada tahun 1960. Tanpa adanya kebijakan yang mengimbangi, tren demografi ini akan menyebabkan menurunnya jumlah tenaga kerja, membebani keuangan publik, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Indonesia telah mengalami masa bonus demografi sejak tahun 2012, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat hingga mencapai 74,39 (tinggi) pada tahun 2023. Melalui fungsi legislasi dan pengawasan, DPR dapat memperkuat program nasional dalam mengatasi pergeseran demografi tersebut.

Indonesia juga mendorong kebijakan lintas sektor yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat untuk meningkatkan kualitas manusia, termasuk di bidang ketenagakerjaan, teknologi informasi, dan pendidikan. Meningkatkan kualitas kesehatan dan harapan hidup masyarakat, termasuk melalui pemerataan akses, infrastruktur, dan kualitas layanan kesehatan hingga ke daerah terpencil. Merumuskan kebijakan lansia yang komprehensif untuk memfasilitasi lansia produktif, termasuk dengan memperpanjang usia pensiun, menyediakan akses pasar kerja bagi lansia untuk sektor tertentu, meningkatkan harapan hidup, dan meningkatkan literasi lansia terkait instrumen investasi.

e. **Update on energy markets and trends**

Sesi ini mengidentifikasi dan mengeksplorasi tren terbesar dalam permintaan dan pasokan energi, serta apa artinya bagi keamanan energi, emisi, dan pembangunan ekonomi. Narasumber sesi ini adalah Tim Gould, Kepala Ekonom Energi dari International Energy Agency (IEA).

Saat ini, pasar energi global tengah mengalami ketidakpastian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk transisi menuju energi terbarukan, fluktuasi harga minyak dunia, dan ketegangan geopolitik.

Sebagai strategi, Indonesia beradaptasi dengan pasar energi global dengan memprioritaskan diversifikasi sumber energi, termasuk penggunaan gas alam, transisi menuju energi terbarukan, dan efisiensi energi. Sesuai dengan komitmen aksi iklimnya untuk mengurangi emisi dan mendorong penggunaan energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, Indonesia berkomitmen untuk lebih mengintegrasikan energi terbarukan ke dalam sistem energi nasional dan mengelola fluktuasi pasokan energi terbarukan.

Saat ini, RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) tengah dibahas di DPR. RUU ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas dan berupaya menyalurkan sektor energi Indonesia dengan prinsip-prinsip berkelanjutan sekaligus mendorong pengembangan dan penerapan sumber energi terbarukan.

f. **Competition policy**

Pada sesi ini dibahas sistem pasar yang kompetitif dan adil memberikan konsumen barang dan jasa yang lebih bermutu, harga yang lebih rendah, dan produk inovatif sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Otoritas persaingan dan pemerintah harus mendorong terciptanya persaingan yang adil bagi para pesaing dan memastikan bahwa kebijakan publik tidak menghalangi pasar untuk bekerja secara efisien, sekaligus tetap mencapai tujuan kebijakan pemerintah. Panelis pada sesi ini antara lain Carmine Di Noia, Direktur Urusan Keuangan dan Perusahaan, dan Yoshiki Takeuchi, Wakil Sekretaris Jendral OECD.

Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pasar yang sehat di mana lebih banyak orang mampu membeli produk, bisnis dapat bertahan dan berkembang, serta meningkatkan ekonomi nasional. Indonesia menyediakan kerangka hukum terkait kebijakan persaingan yang dikembangkan melalui Undang-Undang Persaingan Usaha (UU No. 5 Tahun 1999), yang kemudian diubah dengan UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023.

Selain itu, peningkatan kerja sama internasional terkait persaingan usaha diperlukan. Hal ini mencakup penyeragaman kapasitas penegakan hukum persaingan usaha melalui bantuan teknis dan pengembangan kapasitas, serta mendorong kolaborasi dalam penegakan hukum persaingan lintas batas.

### 3. Hari ke-3

#### a. **Special Session on Accession**

Penyelenggaraan sesi ini hanya terbuka untuk anggota parlemen dari negara-negara yang bergabung dengan OECD dan negara-negara yang sedang dalam proses aksesi. Sesi ini akan memberikan masukan kepada anggota parlemen tentang proses bergabung dengan OECD dan peran parlemen dalam mendukung hal ini. Sesi ini juga akan memberikan kesempatan untuk saling belajar di antara anggota parlemen dari negara yang telah bergabung sebagai anggota masih dalam proses untuk bergabung dengan OECD, di mana mereka akan dapat bertukar pengalaman, pelajaran, dan pendekatan.

Pada sesi ini sekretariat OECD menyampaikan manfaat yang didapat ketika negara bergabung dalam OECD. OECD sendiri menyediakan bantuan teknis bagi negara anggota dan calon negara anggota dalam menyelaraskan dan mengimplementasikan reformasi dalam negeri, meningkatkan tata kelola global, berbagi pengetahuan antar negara, sistem perawatan kesehatan yang efektif, sistem pendidikan (pembandingan), sistem perpajakan,

harmonisasi kebijakan terkait bisnis (yaitu panduan untuk investasi, usaha kecil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, ketenagakerjaan / tempat kerja). Beberapa catatan OECD terhadap Indonesia adalah penyelerasan instrumen hukum terkait Peraturan Anti Suap.

Delegasi Indonesia menyampaikan komitmen kuat dalam mensukseskan proses akses OECD dan kesiapan parlemen dalam mendukung dari segi regulasi dan harmonisasi peraturab. DPR RI menyampaikan dukungan implementasi Peta Jalan Akses Indonesia ke OECD yang telah disahkan pada awal tahun 2024. DPR RI menyatakan peran penting parlemen dalam harmonisasi peraturan dan undang-undang dan memastikan agar sejalan dengan standar OECD dan juga kepentingan nasional Indonesia. Melaksanakan fungsi pengawasan dan akuntabilitas dalam memastikan proses akses berjalan secara transparan, inklusif, dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Parlemen juga akan berdialog secara aktif dengan masyarakat dan bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan baik secara domestic maupun internasional.

Beberapa negara berbagi pengalaman dan tantangan mereka selama proses akses OECD, dengan menawarkan wawasan yang berharga. Kosta Rika menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan yang inklusif, yang sangat penting dalam menyelaraskan prioritas nasional dengan persyaratan OECD. Rumania, yang memulai upaya akses sekitar dua setengah tahun lalu, berfokus pada kesiapan kelembagaan dengan membentuk komite parlemen gabungan yang didedikasikan untuk masalah-masalah OECD. Negara ini secara aktif memfasilitasi debat publik dan kesadaran warga negara, sekaligus menyusun undang-undang antisuap. Bagian penting dari strategi Rumania adalah mengidentifikasi anggota parlemen untuk bertindak sebagai

pejuang OECD, mempromosikan tujuan tersebut di dalam parlemen dan daerah pemilihan mereka.

Kroasia memasuki tahap akhir aksesinya, memperoleh dukungan politik yang luas dari semua partai di parlemen. Negara ini membentuk komisi OECD khusus untuk bertindak sebagai penghubung antara parlemen dan cabang eksekutif. Meskipun memiliki komitmen politik yang kuat, Kroasia menghadapi tantangan yang signifikan dalam mereformasi perusahaan milik negara dan memperbarui kerangka legislatifnya agar selaras dengan standar OECD. Latvia memperlakukan keanggotaan OECD sebagai prioritas nasional dan meningkatkan partisipasinya dalam forum internasional, dengan tujuan untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam pembuatan kebijakan global.

Lithuania berkonsentrasi pada peningkatan koordinasi kelembagaan dan reformasi undang-undang untuk meningkatkan lingkungan bisnisnya. Negara ini mengadopsi sistem klasifikasi “Merah-Kuning-Hijau” untuk menilai kesiapan lembaga publik dan membentuk kelompok kerja untuk setiap instrumen utama OECD. Lithuania juga memprioritaskan pemenuhan semua persyaratan aksesinya lebih awal untuk menghindari koreksi pasca-aksesi yang mahal. Di sisi lain, Peru menghadapi masalah transparansi dan pengawasan, khususnya dalam cara penilaian OECD—seperti yang menyangkut sektor kesehatan—dipersepsikan. Sementara OECD memuji reformasi tertentu, baik parlemen Peru maupun publik menyatakan skeptisisme, yang menyoroti kesenjangan antara penilaian eksternal dan persepsi internal.

### **III. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. OECD *Global Parliamentary Network 2025* yang diselenggarakan di Paris, Perancis pada 5-7 Februari 2024 ini telah berjalan dengan lancar dan menghasilkan rekomendasi bagi negara-negara yang sedang dalam proses aksesasi OECD, termasuk Indonesia.
2. Konferensi Regional ini mendorong kolaborasi antar negara dalam menghadapi perkembangan tantangan global, termasuk di dalamnya adalah terkait ekonomi global, kemajuan teknologi (AI), dinamika kondisi demografi, dan transisi energi hijau.
3. DPR RI telah memberikan pandangan substantif dalam menyampaikan intervensi terhadap tema diskusi, dimana keseluruhan pandangan telah dimasukkan sebagai bagian rekomendasi bagi OECD.
4. Partisipasi DPR RI juga dilaksanakan dalam bentuk diskusi bilateral dengan panitia OECD yang khusus menangani proses aksesasi Indonesia, dan dalam diskusi ini menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Komisi, dan Badan terkait.

#### **B. Saran**

1. Hasil OECD *Global Parliamentary Network 2025* ini memerlukan implementasi dari parlemen masing-masing negara. Oleh karena ini, rekomendasi dari konferensi ini perlu disampaikan kepada Komisi-Komisi terkait di DPR RI untuk ditindaklanjuti.
2. DPR RI perlu berkoordinasi dengan OECD terkait dengan penguatan regulasi nasional agar sejalan dengan ketentuan aksesasi Indonesia ke OECD. Hal ini bisa dijalankan melalui peningkatan kapasitas yang melibatkan Badan dan Komisi terkait di DPR RI, Kementerian dan Lembaga terkait, dan OECD.

#### **IV. PENUTUP**

Delegasi DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tugas Delegasi sehingga misi Delegasi pada *OECD Global Parliamentary Network 2025* dapat tercapai dengan baik.

Ucapan terima kasih disampaikan khususnya kepada Duta Besar RI di Paris, Perancis beserta jajaran atas bantuan dan dukungan serta fasilitas yang diberikan kepada Delegasi DPR RI dan Sekretariat sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Sekretariat Jendral DPR RI, Biro Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, dan Tenaga Ahli atas dukungan teknis dan substansi sejak sebelum dan selama pertemuan berlangsung.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai pustaka sejarah partisipasi DPR RI dalam kegiatan diplomasi parlemen melalui keikutsertaan dalam forum-forum antar parlemen. Laporan ini juga dapat menjadi rujukan bagi keikutsertaan DPR RI dalam forum-forum antar parlemen lainnya di masa mendatang.

Demikian Laporan Delegasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Delegasi DPR RI atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Jakarta, 10 Februari 2025

a.n. Delegasi  
Ketua Delegasi

Tertanda

**Bramantyo Suwondo, M.IR.**







@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr



Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY  
COOPERATION  
INDONESIAN HOUSE OF  
REPRESENTATIVES  
(BKSAP DPR RI)

Email: [biro\\_ksap@dpr.go.id](mailto:biro_ksap@dpr.go.id)

Phone: (62-21) 5715813

[ksap.dpr.go.id](http://ksap.dpr.go.id)